

**KAJIAN KEHADIRAN AMERIKA SERIKAT
DI KAWASAN ASIA TENGGARA DAN IMPLIKASINYA
BAGI PERTAHANAN NEGARA INDONESIA**

*Penulis: Kolonel Pnb Jefry Yandi
Marsda TNI Dr. Umar Sungeng H., M.M.
Marsma TNI Emanuel Sugiharto*

Pendahuluan

1. Kehadiran kekuatan AS di Asia Tenggara telah dirintis sejak munculnya AS sebagai kekuatan imperialis baru setelah mengalahkan Spanyol di abad ke-19 dan menguasai Kepulauan Filipina. Keberadaan AS di Filipina merupakan kekuatan pelengkap Sekutu di kawasan Asia Pasifik, dimana pada waktu itu Inggris telah menguasai Australia, India, Burma, Srilanka, Malaya, Singapura dan Hongkong, sedangkan Belanda menguasai Hindia Timur (Indonesia) dan Perancis menguasai Indo China. Pasca kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, kekuatan Sekutu di Asia Tenggara tidak memiliki pesaing, hingga memasuki era Perang Dingin dimana Sekutu harus bersaing pengaruh dengan Uni Soviet. AS dan Inggris bersama-sama dengan Australia, Perancis, Pakistan, Filipina, Selandia Baru dan Thailand membentuk *South East Asia Treaty Organization (SEATO)* pada tahun 1954. Dekatnya hubungan Uni Soviet dengan beberapa negara di Asia Tenggara seperti Indonesia dan Vietnam Utara (Republik Sosialis Vietnam) membuat persaingan pengaruh semakin meruncing dan memunculkan konflik di wilayah tersebut antara lain konfrontasi Indonesia-Malaysia serta meletusnya Perang Indo China II (intervensi militer AS di Vietnam).

2. Memasuki penghujung abad ke-20, beberapa peristiwa penting seperti bubarnya Uni Soviet, runtuhnya tembok Berlin, dan *trend* kebangkitan Tiongkok sebagai raksasa baru ekonomi mengubah peta kekuatan dunia. AS melihat peran militernya di Asia Pasifik lebih difokuskan kepada pemeliharaan stabilitas keamanan lalu lintas maritim dan perdagangan di kawasan tersebut. Kehadiran militer AS di Pasifik Barat hanya difokuskan di Korea Selatan, Okinawa (Jepang), dan Guam. Namun seiring memanasnya sengketa di Laut China Selatan yang ditandai dengan semakin asertifnya perilaku militer Tiongkok di kawasan, AS mulai menempatkan marinirnya di Darwin, Australia secara berangsur-angsur yang selanjutnya disempurnakan dari sejumlah 250-an hingga menjadi total 2500 personel plus armadanya. Pengaruh kehadiran AS di Asia Tenggara tidak terlepas dari eksistensi kepentingan Tiongkok di wilayah tersebut dengan segala perkembangannya, termasuk

asertifitas militer Tiongkok terkait klaimnya di Laut China Selatan. Meskipun AS menyatakan penempatan pasukannya sebagai antisipasi masalah logistik dalam operasi militer selain perang, yaitu bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana (*humanitarian assistance and disaster relief–HADR*) di kawasan, langkah ini dipandang banyak pihak sebagai *counter-balance* dari agresivitas AL Tiongkok (*People’s Liberation Army Navy–PLAN*) di perairan sekitar *First* dan *Second Island Chain* (sesuai definisi Tiongkok terhadap implementasi strategi *Anti-Access and Area-Denial–A2AD*) serta antisipasi konflik di Laut China Selatan.

3. Dalam persaingan memperebutkan pengaruh di Asia Tenggara, AS berada pada posisi yang lebih menguntungkan. Hal ini disebabkan karena dengan melihat sengketa yang terjadi di sub-kawasan tersebut, khususnya sengketa di Laut China Selatan, AS bisa bersikap cenderung lebih berpihak kepada negara-negara Asia Tenggara dalam berhadapan dengan Tiongkok. Dengan memperkuat hubungan negara-negara Asia Tenggara, tentunya AS memiliki peluang untuk menekan pengaruh Tiongkok atau mengendalikan kepentingan Tiongkok di wilayah tersebut. Pengaruh krisis ekonomi dunia yang diawali dengan krisis utang di AS dan dilanjutkan dengan Zona Euro (Eropa), menempatkan Asia Pasifik sebagai satu-satunya kawasan yang tidak tersentuh krisis. Namun demikian, krisis tersebut pada kenyataannya juga mengakibatkan perlambatan ekonomi di seluruh dunia, tidak terkecuali Asia Pasifik. Krisis juga berimplikasi kepada pemotongan anggaran militer AS dan pengetatan anggaran lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, AS telah menetapkan fokus ekonomi ke Asia Pasifik melalui pencanangan kebijakan “*pivot to Asia*.” Dengan demikian juga berarti bahwa militer AS akan tetap hadir di kawasan tersebut, hal ini sesuai dengan kebijakan Amerika yang mengurangi aktivitas dan anggaran komando militer AS di berbagai kawasan terkecuali di Asia Pasifik (US PACOM).

4. **Daftar pengertian.** Untuk menyamakan persepsi dalam penulisan ini, maka dibuat daftar pengertian sebagai berikut:

- a. ***Choke point.*** *Choke point* adalah fitur geografis di daratan seperti lembah, defile atau jembatan atau selat yang mau tidak mau harus dilalui oleh pasukan untuk mencapai tujuan, biasanya dengan front yang lebih sempit sehingga mengurangi kemampuan tempur pasukan tersebut.¹

¹Wikipedia diakses dari <https://id.m.wikipedia.org> pada tgl. 2 Januari 2018 pukul 13.00 WIB

b. Asertifitas. Asertifitas adalah suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain/ketegasan.²

5. Rumusan Permasalahan. Berdasarkan dari uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah yang terkait sebagai berikut:

- a. Apa bentuk konkret kehadiran kekuatan Amerika Serikat di Asia Tenggara saat ini?
- b. Bagaimana kemungkinan skenario-skenario di Asia Tenggara sebagai arena persaingan AS-Tiongkok?

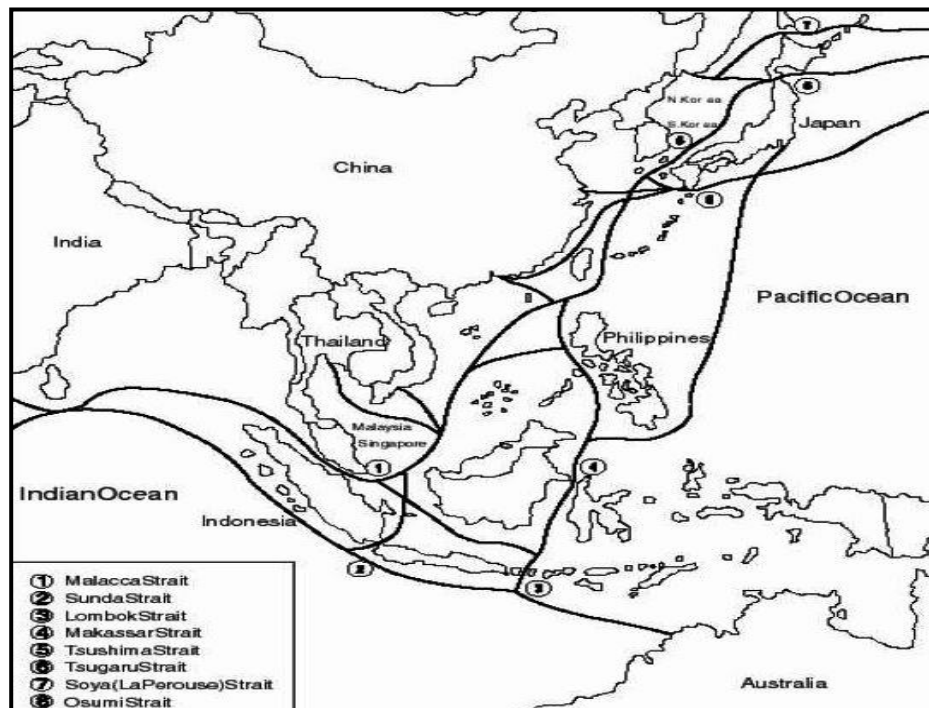
Dasar pemikiran

6. Kepentingan politik dan ekonomi AS di Asia Tenggara semakin terancam dengan adanya perkembangan kekuatan Tiongkok yang terus menunjukkan peningkatan, khususnya dalam hal kapabilitas militernya. Rivalitas kepentingan kedua negara besar tersebut menjadi semakin nyata, ketika ASEAN berupaya mencari penyelesaian damai atas sengketa di Laut China Selatan, tampak ada pengaruh AS dan Tiongkok di antara negara-negara anggota ASEAN, dimana ada ketidaksepakatan atas itikad ASEAN dalam menyusun *code of conduct* di Laut China Selatan, sebagaimana terjadi pada *ASEAN Ministers' Meeting* di Phnom Penh. Dari gambaran situasi di antara negara-negara anggota ASEAN, kepentingan AS diwakili oleh Singapura, Thailand, dan Filipina, sedangkan kepentingan Tiongkok difasilitasi oleh Kamboja dan Myanmar. Sementara Vietnam lebih dominan menunjukkan kepentingan nasionalnya dalam mengklaim wilayah-wilayah di Laut China Selatan, khususnya Kepulauan Spratly dan Paracel. Tiga negara lainnya yaitu Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia bersikap konstruktif dalam mencari solusi damai terkait sengketa di Laut China Selatan. Sedangkan Laos cenderung bersikap netral dan mengikuti suara mayoritas karena adanya pengaruh yang seimbang dari kekuatan yang berseberangan, yakni Vietnam dan Tiongkok, di samping juga Laos tidak memiliki kepentingan di Laut China Selatan. Oleh karena peran dan sepak terjang AS di Asia Tenggara memiliki implikasi langsung terhadap kedaulatan Indonesia, maka diperlukan kajian yang mengurai gambaran umum kehadiran kekuatan AS di sub-kawasan tersebut serta pengaruhnya terhadap Indonesia.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia

Data dan Fakta

7. **Asia Tenggara dalam Jalur Perdagangan Dunia.** Wilayah perairan Asia Tenggara telah berperan menjadi penghubung utama dalam kegiatan perdagangan dunia sejak ratusan tahun yang lalu. Letak geografis Asia Tenggara yang berada di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik menjadikan Asia Tenggara sebagai lokasi transit dan perlintasan dari aktivitas perdagangan lintas samudera antara bangsa-bangsa Asia dan Eropa. Sejak abad ke-7 Asia Tenggara telah menjadi jalur alternatif dari pengangkutan komoditas dari Tiongkok ke belahan bumi barat dan sebaliknya yang sebelumnya hanya dilakukan lewat jalan darat melalui Jalur Sutera. Perkembangan teknologi perkapalan di sisi lain mendorong pergeseran cara pengangkutan komoditas. Aktivitas pengangkutan barang dan manusia melalui laut mampu mengangkut dalam volume yang besar dan semakin efisien. Perubahan ini mendorong semakin tingginya aktivitas perdagangan lintas regional yang melalui kawasan Asia Tenggara. Nilai strategis kawasan Asia Tenggara bagi perdagangan dunia tersebut tetap bertahan hingga kini. Perkembangan yang tengah terjadi di kawasan tampaknya justru akan meningkatkan peran Asia Tenggara sebagai penghubung utama aktivitas ekonomi lintas kawasan. Jalur penghubung laut (*Sea Lines of Communications*–SLOCs) di Asia Tenggara masih akan menjadi salah satu urat nadi utama perekonomian regional dan global.



Gbr 1. Peta Jalur Pelayaran Strategis Asia Tenggara
(Sumber: Asia-Pacific Center for Security Studies)

Kawasan Asia Timur kini tengah berkembang dengan pesat. Reformasi ekonomi di Tiongkok telah mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang dipacu oleh industrialisasi ini menjadikan Tiongkok kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah AS. Selain itu di Asia Timur juga terdapat Jepang dan Korea Selatan yang sudah lebih dahulu menjadi negara industri yang mapan. Produktivitas dari negara-negara tersebut membutuhkan penyaluran dalam bentuk ekspor komoditas ke luar negeri. Dalam hal ini upaya untuk mencapai akses pasar secara lebih luas akan semakin tergantung kepada terbukanya akses pelayaran utama dunia yang di antaranya terdapat di Asia Tenggara. Pertumbuhan industri yang pesat di Asia Timur mendorong konsekuensi bagi meningkatnya kebutuhan akan energi dan bahan mentah. Jepang dan Korea Selatan merupakan negara yang relatif miskin sumber bahan mentah dan energi. Sementara Tiongkok meskipun memiliki banyak sumber bahan mentah dan energi, tidak mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri yang terus meningkat sejalan dengan peningkatan aktivitas industri. Bagi negara-negara industri di Asia Timur tersebut, impor bahan mentah dan energi merupakan solusi untuk menjaga kelangsungan pertumbuhan perekonomian. Situasi ini berkembang menjadi ketergantungan negara-negara tersebut terhadap akses SLOC di Asia Tenggara. Asia Timur merupakan kawasan pengimpor sumber energi hidrokarbon terbesar di dunia. Sebagai gambaran Tiongkok sebagai negara yang tengah mengembangkan industri dalam negeri sangat tergantung kepada impor sumber energi dari negara-negara Timur Tengah. Sekitar 54% kebutuhan minyak mentah Tiongkok diimpor dari Timur Tengah. Selain minyak mentah, Tiongkok juga mengimpor sekitar 25% kebutuhan gas alam dari Qatar dan Yaman. Jepang dan Korea Selatan mengimpor masing-masing sejumlah 83% dan 85% kebutuhan minyak mentah juga dari Timur Tengah. Sebagian besar dari impor energi tersebut dikirim melalui jalur pelayaran yang melintasi wilayah Asia Tenggara (Selat Malaka dan Selat Sunda).

Di sisi lain, Asia Tenggara masih menyimpan sejumlah potensi konflik tradisional warisan sejarah yang berpotensi mengancam stabilitas keamanan regional. Potensi konflik tradisional ini meliputi sengketa wilayah perbatasan di antara sebagian negara-negara Asia Tenggara, masalah otoritarianisme dan demokratisasi, dan separatisme yang berkonjungsi dengan radikalisme. Asia Tenggara ke depan akan menjadi kawasan dengan dinamika yang tinggi. Nilai strategis kawasan ini dalam transisi menuju perubahan tatanan regional akan menjadi daya tarik bagi banyak kekuatan baik regional maupun global untuk mempengaruhi proses integrasi kawasan. Namun berbagai potensi konflik tradisional yang ada, diperkirakan proses integrasi ini akan menghadapi tantangan dalam tahap implementasinya.

b. Peta Konflik.

1) Laut China Selatan. Konflik tradisional terkait sengketa wilayah perairan di Laut China Selatan merupakan salah satu variabel utama dalam struktur keamanan regional, akibat sengketa wilayah di Laut China Selatan ini merupakan konflik yang berpotensi untuk berkembang menjadi sangat kompleks. Kompleksitas konflik di Laut China Selatan dapat terjadi karena luasnya dimensi kepentingan dari negara-negara yang terlibat konflik. Di antara kepentingan-kepentingan tersebut meliputi wilayah penangkapan ikan, potensi eksploitasi cadangan sumber daya energi (minyak bumi dan gas alam) serta kendali atas jalur-jalur pelayaran strategis, sehingga dapat semakin berkembang karena terlibatnya aktor-aktor eksternal yang sebenarnya tidak terkait langsung dengan konflik tersebut. India dengan kebijakan pandangan ke timur (*look east policy-LEP*) mulai melakukan serangkaian pendekatan kepada negara-negara Asia Tenggara baik melalui forum multilateral ASEAN maupun pendekatan secara bilateral. Perkembangan paling menonjol dari LEP ini adalah kerjasama yang semakin intensif antara India dan Vietnam. Hal ini merupakan isyarat yang kuat bahwa India tampak berupaya menandingi Tiongkok yang kini juga tengah berusaha untuk memperluas pengaruhnya di Samudera Hindia. Bagi Vietnam, pendekatan India ini merupakan suatu hal yang menguntungkan untuk memperkuat posisinya dalam sengketa klaim di Laut China Selatan dengan semakin intensifnya kehadiran kekuatan Tiongkok di wilayah sengketa.

Tanggal/Bulan	Kejadian
April	Kapal perang Filipina bertemu dengan dua kapal pengawas maritim Tiongkok di <i>Scarborough Shoal</i> .
Mei	Taiwan menolak proposal Tiongkok untuk menyamakan sikap dalam Pan-Tiongkokguna memperkuat klaim di Laut China Selatan.
Juni	Kapal perang AL India berlayar di Laut China Selatan mendapat pengawalan dari frigat <i>People's Liberation Army Navy (PLAN)</i> selama 12 jam.
11 Juli	Kapal Frigate PLAN terdampar di sekitar <i>Hasa-hasa Shoal</i> , yang masih berada dalam ZEE Filipina.
Juli	Parlemen Vietnam mengesahkan regulasi mengenai perbatasan laut Vietnam termasuk di dalamnya Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel.
Juli	Kamboja dilaporkan Reuters berusaha menolak memasukkan isu sengketa wilayah perairan dalam rangkaian pertemuan tingkat tinggi ASEAN dan <i>ASEAN Regional Forum</i> .
22 Juli	Komisi Militer Pusat Tiongkok menetapkan pembentukan Garnisun Sansha. Kebijakan ini diprotes keras oleh Filipina dan Vietnam.
5 September	Presiden Filipina, Benigno Aquino mengesahkan serangkaian keputusan pemerintah yang menyebutkan penamaan perairan di sebelah barat Filipina sebagai 'Laut Filipina Barat'.
23 September	Tiongkok mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan patroli pesawat tanpa awak di Scarborough Shoal, Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly dan Laut Tiongkok Timur sebagai implementasi dari Program Zonasi Kelautan Nasional.
Desember	Dalam wawancara dengan <i>The Times of India</i> , Wapres Filipina, Binay menyatakan dukungan terhadap pernyataan perwira tinggi AL India Laksamana Joshi yang mengatakan AL India siap untuk beroperasi di Laut China Selatan.

Tabel 1. Kronologis Konflik Laut China Selatan

Implementasi dari kerja sama strategis India-Vietnam terlihat dalam berbagai bentuk. India pernah menawarkan kredit alutsista senilai 100 juta dollar AS kepada Vietnam. Kemudian India dan Vietnam melakukan latihan angkatan laut bersama di perairan Laut China Selatan.³ Peningkatan kehadiran India di Laut China Selatan merupakan sebuah isyarat nyata akan kemungkinan

³ *Indian-Vietnam Naval Exercise Launched in SouthTiongkok Sea*, diakses dari <http://www.wantTiongkoktimes.com/news-subclass-cnt.aspx?id=20130610000067&cid=1101>, 10 Juni 2013, pada 23 Desember 2017.

semakin tingginya kerentanan eskalasi di perairan yang dipersengketakan sejumlah negara ini dalam beberapa waktu ke depan.



Gbr. 3 Peta Konflik Laut China Selatan⁴

Sejalan dengan kebijakan penyeimbangan kembali (*rebalancing*) AS di Asia Pasifik, perkembangan Laut China Selatan juga mendapatkan perhatian khusus dari AS. Perhatian ini terutama karena keberadaan negara sekutu AS yaitu Filipina yang terlibat langsung dalam sengketa wilayah perairan di Laut China Selatan. Kondisi ini merupakan prasyarat yang sangat memungkinkan bagi AS untuk melakukan intervensi dalam konflik Laut China Selatan ketika eskalasi konflik mencapai tahap tertentu. Dalam rangka membantu peningkatan kekuatan AL Filipina, AS telah menghibahkan dua kapal patroli eks-U.S. *Coast Guard* kepada Filipina. Selain bantuan kepada Filipina, AS juga melakukan langkah-langkah pendekatan kepada Vietnam. Dukungan AS kepada negara-negara yang berpotensi konflik dengan Tiongkok di Laut China Selatan tampaknya merupakan strategi untuk membendung sikap asertif Tiongkok di Laut China Selatan serta di Asia Tenggara secara umum.

2) Sengketa Perbatasan Thailand-Kamboja. Sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja dipicu oleh saling klaim atas wilayah di sekitar Kuil Preah Vihear yang telah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu. Secara hukum, Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) sejak tahun

⁴ Tiongkok Times, 2012

1962 telah menyatakan secara resmi bahwa wilayah Kuil Preah Vihear merupakan bagian dari wilayah negara Kamboja, mengacu kepada peta tahun 1907 dimana wilayah tersebut berada dalam peta Kamboja. Pihak Thailand meskipun patuh terhadap keputusan Mahkamah Internasional namun tetap bepegang pada pendapat bahwa garis batas wilayah di sekitar Kuil Preah Vihear belum secara resmi ditetapkan.

3) Thailand Selatan. Thailand Selatan dikenal sebagai basis gerakan perlawanan terhadap Pemerintah Thailand. Gerakan perlawanan ini tersebar di tiga provinsi paling selatan Thailand yaitu Patani, Yala dan Narathiwat, namun secara umum warga di Selatan Thailand menyebut tiga provinsi ini sebagai daerah Patani. Perlawanan terhadap Pemerintah Thailand didorong oleh berbagai faktor yang kompleks mulai dari politik, ekonomi dan HAM. Berbeda dengan sebagian besar penduduk Thailand yang beragama Budha, daerah Patani yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini berpenduduk mayoritas etnis Melayu dan beragama Islam. Diskriminasi terhadap penduduk beragama Muslim kemudian berkembang menjadi konflik vertikal dan horizontal secara simultan. Gerakan perlawanan Patani terbagi ke dalam sejumlah organisasi meliputi *Patani United Liberation Organization* (PULO) sebagai organisasi perlawanan terbesar serta sejumlah organisasi seperti Gabungan Melayu Patani Raya (GEMPAR), Negara Patani Raya, Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani (BRN), dan Revolusi Nasional Melayu Patani Koordinasi (BRN-Coordinate). *Human Rights Watch* (HRW) mencatat baik Pemerintah Thailand maupun kelompok perlawanan Patani sama-sama melakukan pelanggaran HAM.⁵ Gerakan kelompok perlawanan Patani melakukan sejumlah penyerangan kepada target-target yang dianggap representasi dari Pemerintah Thailand mulai dari fasilitas militer dan markas kepolisian hingga warga sipil beragama Budha, sekolah serta berbagai simbol kepentingan Pemerintah Thailand. Sedangkan di sisi lain aparat Pemerintah Thailand juga dianggap bertanggungjawab terhadap hilangnya sejumlah warga muslim lokal dalam serangkaian penangkapan dan interogasi. Berbagai bentuk upaya penyelesaian pertikaian antara Pemerintah Thailand dengan

⁵*Thailand: Beheadings, Burnings in Renewed Terror Campaign: Insurgents Must Cease Targeting Civilians in the South*, Human Rights Watch, diakses dari <http://www.hrw.org/en/news/2017/07/06/thailand-beheadings-burnings-renewed-terror-campaign>>, pada tanggal 23 Desember 2017.

gerakan perlawanan Patani telah banyak dilakukan. Pembicaraan kesepakatan damai terakhir dilakukan di Kuala Lumpur antara perwakilan kelompok Patani yang dipimpin oleh Hassan Taib dari BRN. Sedangkan delegasi Pemerintah Thailand dipimpin oleh Sekjen Dewan Keamanan Nasional Thailand, Letjen Paradon Pattanatabut.

4) Filipina Selatan. Gerakan perlawanan di Filipina Selatan pada awalnya merupakan bentuk respon terhadap berbagai bentuk ketidakadilan terhadap warga lokal di Filipina Selatan (Pulau Mindanao, Pulau Palawan dan Kepulauan Sulu) oleh kelompok pendatang dan aparat Pemerintah Filipina. *Moro National Liberation Front* (MNLF) yang didirikan oleh Nur Misuari menjadi wadah organisasi pertama yang menaungi gerakan perlawanan. Hashim Selamat salah satu pimpinan MNLF kemudian mendirikan *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) serta melanjutkan perlawanan. MILF kemudian sering dikaitkan dengan serangan bersenjata, penculikan dan bom di Filipina Selatan. Selama periode konflik yang berlangsung 40 tahun lebih dari 120.000 korban tewas dari kedua belah pihak dan warga sipil.⁶ Kompleksitas separatisme di Filipina Selatan berkembang ketika MILF disebutkan mempunyai afiliasi dengan Al Qaeda. Kelompok ini kemudian dianggap sebagai penyebab meningkatnya radikalisme di Filipina Selatan. Kelompok Abu Sayaf mempunyai tujuan untuk mendirikan negara Islam di Filipina Selatan dalam rangka merealisasikan idealismenya kelompok ini menggunakan berbagai bentuk kekerasan mulai dari penculikan, pemerasan, pembunuhan hingga pembunuhan terhadap lawan-lawannya. Berdasarkan kerangka kerja sama yang disepakati maka akan dibentuk daerah otonomi Muslim termasuk di dalamnya terdapat kesepakatan mengenai pembagian hasil sumber daya alam yang adil, otonomi anggaran, aparat kepolisian tersendiri dan pemberlakuan syariat Islam bagi warga Muslim. Kesepakatan damai ini ditentang oleh Nur Misuari, salah satu pimpinan utama MNLF. Selain Nur Misuari di Kepulauan Sulu terdapat Jamalul Kiram III yang merupakan salah satu pengklaim tahta Kesultanan Sulu yang juga menolak hasil kesepakatan damai Pemerintah Filipina dan MILF. Sebagai bentuk kekecewaan terhadap kesepakatan damai ini, milisi bersenjata dari Kepulauan Sulu yang menyebut dirinya sebagai

⁶ Masako. Ishii, *The Southern Philippines: Exit from 40 Years of Armed Conflict*, diakses dari <http://peacebuilding.asia/the-southern-philippines-exit-from-40-years-of-armed-conflict/>, pada 24 Desember 2017.

tentara Kesultanan Sulu melancarkan sejumlah serangan bersenjata ke wilayah Sabah di Malaysia. Dengan justifikasi klaim Kesultanan Sulu atas wilayah Sabah, gerilyawan Sulu menyusup masuk Sabah melalui Lahad Datu. Serangan ini mendapatkan respon keras dari Pemerintah Malaysia yang mengirimkan kekuatan militer untuk memukul balik penyerang dari luar tersebut. Pasukan AD Malaysia yang dipersenjatai dengan baik dan didukung pesawat pengebom-tempur F/A-18 dengan mudah mengalahkan kekuatan gerilyawan Sulu. Akibat konflik ini sejumlah besar warga Filipina yang tinggal secara ilegal di wilayah Sabah selama beberapa dekade terusir dan dideportasi kembali ke negara asalnya. Baik MNLF maupun MILF menyatakan tidak terlibat dalam aksi penyerangan ke Sabah ini.

5) Myanmar. Myanmar merupakan salah satu negara Asia Tenggara yang banyak mendapatkan perhatian dari komunitas regional dan global. Perhatian khusus ini didorong oleh kompleksitas isu yang melingkupi situasi sosial politik dalam negeri Myanmar serta pola-pola hubungan luar negeri yang dilakukan Myanmar di kawasan. Setidaknya ada tiga hal utama terkait Myanmar yang layak menjadi perhatian yaitu masalah otoritarisme dan demokratisasi, konflik horizontal yang dipicu perbedaan etnis dan agama serta kedekatan hubungan bilateral dengan Tiongkok.

c. Kerjasama Keamanan Regional.

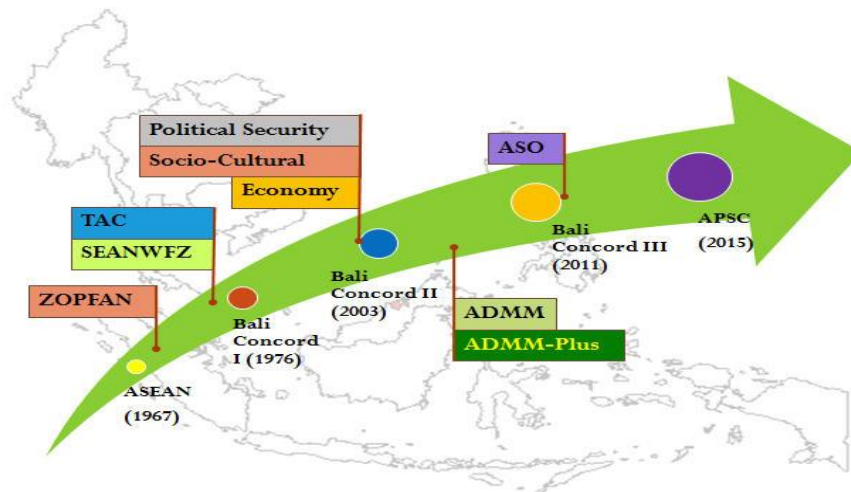
1) *Five Power Defence Arrangement (FPDA)*. *The Five Power Defence Arrangement (FPDA)* merupakan kerjasama pertahanan yang dibentuk melalui serangkaian kesepakatan antara Inggris, Australia, Selandia Baru, Malaysia dan Singapura. FPDA ditandatangani oleh negara-negara anggota Persemakmuran tersebut pada tahun 1971. Adapun substansi utama dari pembentukan FPDA ini adalah lima negara penandatangan kesepakatan akan berkonsultasi bersama ketika terjadi ancaman agresi atau serangan terhadap Malaysia atau Singapura termasuk membahas respon yang akan diambil terhadap ancaman atau serangan tersebut. Latar belakang politik dan keamanan pada tahun-tahun menjelang penandatangan FPDA membuat banyak pihak berasumsi bahwa FPDA secara implisit merupakan respon terhadap kekhawatiran ancaman dari Indonesia terhadap Malaysia dan

Singapura. Pada awal masa pembentukan FPDA lebih kepada forum konsultatif dan bukan berbentuk aliansi formal. Namun dalam perkembangannya, ruang lingkup kerja sama FPDA semakin luas. Transformasi FPDA ini tampak sejak akhir tahun 1990-an yang terlihat pada penguatan struktur konsultatif, dilengkapi dengan kesiapan kekuatan militer multilateral dan program pelatihan yang menyeluruh.⁷ Aktivitas FPDA secara bertahap berkembang dari masalah pertahanan udara Malaysia dan Singapura yang diwujudkan dalam latihan tahunan *Air Defence Exercises* (ADEXs), kepada latihan militer gabungan lintas-matra dalam skala besar. Metode-metode latihan baru ini disebut untuk meningkatkan kesiapan menghadapi ancaman konvensional dan non-konvensional hingga ke wilayah Laut China Selatan. Keberadaan FPDA ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika regional Asia Pasifik dan Asia Tenggara pada khususnya. Terkait dengan sejarah pembentukannya pada masa Perang Dingin, relevansi dari FPDA dianggap cenderung berkurang. Situasi regional lain yang dihadapi FPDA adalah tren regionalisme kawasan yang semakin kuat. Dinamika kerja sama keamanan regional telah menghasilkan bentuk-bentuk kerja sama keamanan regional yang baru dan lebih luas ruang lingkup isu dan keanggotaannya seperti *ASEAN Regional Forum* (ARF) dan rencana pembentukan *ASEAN Political and Security Forum* (APSC). Di lain pihak FPDA juga dianggap telah berusaha untuk menyesuaikan peran FPDA dengan isu-isu regional kontemporer dengan memasukkan masalah keamanan non-konvensional seperti terorisme dan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam (HADR).

2) *ASEAN Political Security Community* (APSC). Sejak terbentuknya *the ASEAN Defence Ministers' Meeting* (ADMM) di Kuala Lumpur, kerja sama keamanan regional di antara negara-negara anggota ASEAN semakin meningkat. Hasil-hasil pertemuan dalam kerangka ADMM tersebut telah mulai diimplementasikan melalui *Three-Year Program* (Program Tiga Tahunan) yang juga melibatkan negara-negara di luar ASEAN dan telah menghasilkan kerja sama praksis di lima bidang antara lain Keamanan Maritim, Bantuan

⁷Carlyle A. Thayer, *The Five Power Defence Arrangements: The Quiet Achiever* dalam *Security Challenges* Vol.3 No.1, February 2017, Kokoda Foundation, p. 80.

Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Terorisme, Operasi Pemeliharaan Perdamaian, dan Pengobatan Militer.



Gbr. 4 Perkembangan Kerja sama Keamanan ASEAN

Sekitar satu dasawarsa sebelum terbentuknya ADMM, *ASEAN Ministerial Meeting* (AMM) ke-26 dan *Post-Ministerial Meeting* di Singapura telah menyetujui pembentukan *ASEAN Regional Forum* (ARF). Forum tersebut merupakan forum konsultatif yang memfasilitasi dialog dan kerja sama di bidang politik dan keamanan, yang saat ini telah beranggotakan sebanyak 27 negara di kawasan Asia Pasifik. Penyelenggaraan *ARF Security Policy Conference* (APSC) dan *ARF Defence Officials Dialogue* (ARF DOD) di Surabaya yang menghasilkan kesepakatan untuk menggabungkan program-program ADMM-Plus dan ARF yang beririsan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan penyelenggaraannya menjadi lebih efisien. Kerja sama keamanan regional yang dikawal ARF melalui forum konsultasi ASPC dan ARF DOD, serta implementasi ADMM-Plus melalui Program Tiga Tahunan merupakan wahana multilateral yang ditujukan untuk membangun kesalingpercayaan antar negara (*confidence-building*) dan sebagai sarana diplomasi pencegahan konflik (*preventive diplomacy*). Terlebih sejak digulirkannya ADMM dan ADMM-Plus, implementasi prinsip-prinsip yang diperjuangkan ASEAN antara lain melalui *Zone of Peace, Freedom and Neutrality* (ZOPFAN—Zona Perdamaian, Kebebasan, dan Netralitas), *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC—Perjanjian Persahabatan dan Kerja sama), serta *Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone* (SEANWFZ—Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara)

telah menambah kepercayaan diri ASEAN untuk membentuk komunitas regional khususnya di bidang keamanan. Dicanangkannya pembentukan Komunitas ASEAN yang berdasarkan tiga pilar, yakni Keamanan Politik, Sosial Budaya, dan Ekonomi.

9. **Kepentingan Amerika Serikat di Asia Tenggara.**

a. Perspektif Amerika Serikat terhadap Asia Tenggara. Kepentingan AS terhadap sub-kawasan Asia Tenggara sendiri senantiasa mengalami perubahan sejalan dengan dinamika lingkungan strategis kawasan. Adapun kehadiran AS di Asia Tenggara setidaknya terkait dengan tiga faktor yaitu geostrategis Asia Tenggara, upaya membendung pengaruh Tiongkok di Asia Tenggara, dan keberadaan negara sekutu AS di Asia Tenggara.

b. Tatanan Global versi Amerika Serikat. Sebagai satu-satunya kekuatan adidaya, AS berpengaruh luas dalam tata keamanan regional dan global. Keberadaan tatanan ini adalah merupakan representasi dari upaya AS untuk merekayasa lingkungan strategis agar tercipta situasi yang kondusif bagi usaha-usaha AS dalam meraih dan mempertahankan kepentingan nasional AS dan melindungi negara-negara sekutunya. Namun tatanan keamanan global yang sudah mapan ini menghadapi sejumlah tantangan dengan adanya perkembangan baru dalam politik internasional. Dari sejumlah kawasan di dunia muncul beberapa kekuatan baru yang berpotensi untuk menggeser struktur politik dunia yang unipolar menjadi multipolar.

c. Strategi Amerika Serikat di Asia Tenggara. Strategi AS merupakan representasi dari upaya AS untuk meraih dan melindungi kepentingan nasional AS di seluruh dunia. Strategi AS ini sangat dipengaruhi oleh cara pandang AS terkait posisi AS sebagai kekuatan adidaya. Hal tersebut tampak jelas dalam Strategi Keamanan Nasional AS, bahwa AS menghadapi urgensi untuk memperbaharui kepemimpinan AS di dunia dengan cara membangun dan menumbuhkan kekuatan serta pengaruh AS. Keamanan global dianggap tergantung kepada kepemimpinan AS yang kuat dan bertanggung jawab. Kebijakan ini diimplementasikan dalam bentuk kekuatan militer, perekonomian dengan daya saing yang tinggi, kepemimpinan moral, partisipasi global dan upaya untuk membentuk sistem internasional yang dapat

bermanfaat bagi kepentingan bersama AS dan komunitas dunia. Dinamika global yang berlangsung dengan cepat mengharuskan AS untuk beradaptasi dalam rangka terus maju untuk mencapai kepentingan nasional dan mempertahankan kepemimpinan AS di dunia.⁸ Adapun kepentingan nasional AS dalam pernyataan itu disebutkan sebagai berikut:

- 1) Keamanan dan keselamatan Negara AS, warga negara AS dan negara-negara sekutu dan mitra AS;
- 2) Perekonomian AS yang kuat, inovatif, dan terus tumbuh dalam sistem ekonomi internasional yang terbuka serta mengedepankan kesempatan dan kesejahteraan;
- 3) Penghargaan kepada nilai-nilai universal di dalam negeri dan di seluruh dunia; dan
- 4) Tatanan internasional dalam kepemimpinan AS yang memajukan perdamaian, keamanan dan kesempatan melalui kerja sama yang kuat dalam rangka menghadapi tantangan global.

Strategi AS di Asia Tenggara pada dasarnya AS akan berupaya bertindak dalam konteks negara adidaya yang mempertahankan dominasi global. Kebijakan *rebalancing* di Asia Pasifik dapat dipahami bentuk upaya AS untuk mengembalikan kesetimbangan regional yang relatif bergeser dengan menguatnya posisi Tiongkok sebagai aktor regional.

10. **Persaingan Global AS-Tiongkok.**

a. Kebangkitan dan Ambisi Tiongkok di Asia Tenggara. Dalam dua dekade terakhir, perkembangan situasi keamanan Asia Pasifik hampir selalu dikaitkan dengan munculnya Tiongkok sebagai kekuatan baru di tingkat regional. Kemajuan yang dicapai Tiongkok kini tidak dapat dilepaskan dari upaya Deng Xiaoping untuk merombak keseluruhan sistem dan kultur peninggalan Mao Zedong yang dianggap

⁸ Office of The Presiden of The United States of America, *National Security Strategy 2010*, May 2010, p. 7

konservatif dan menghalangi kemajuan Tiongkok itu sendiri. Diawali dengan kebijakan Reformasi di tahun 1979 Tiongkok mulai mengejar ketertinggalan dari negara-negara di kawasan.

1) Politik Luar Negeri Tiongkok di Asia Tenggara. Politik luar negeri Tiongkok modern tidak dapat dilepaskan dari status Tiongkok sebagai kekuatan negara besar diperhitungkan. Kecenderungan peran Tiongkok yang semakin besar dalam konstelasi politik global, merupakan konsekuensi logis dari ambisi Tiongkok untuk menjadi aktor negara yang lebih dominan. Dalam hal ini, kebijakan luar negeri Tiongkok dalam beberapa dekade terakhir dipandang sebagai salah satu variabel menentukan dalam membentuk struktur politik internasional ke depan. Munculnya Tiongkok sebagai kekuatan baru merupakan sebuah fenomena yang dianggap sebagai proses kembalinya status Tiongkok sebagai pusat kekuatan dan peradaban dunia. Dalam konteks modern, Tiongkok terlihat secara sistematis berupaya mencapai tingkatan kekuatan hegemoni tertentu. Terkait dengan hal ini, Tiongkok telah menunjukkan sejumlah kebijakan untuk memperluas cakupan pengaruh (*sphere of influence*), khususnya di wilayah-wilayah periferi Tiongkok. Tiongkok dalam banyak hal terkait kebijakan luar negeri mulai menunjukkan tanda-tanda sikap yang identik dengan negara-negara hegemon. Pada sejumlah kasus dapat dilihat Tiongkok telah mengembangkan kebijakan luar negeri dengan memposisikan diri sebagai patron bagi negara-negara mitra kerja sama. Hal ini tampak jelas dalam inisiatif Tiongkok membentuk organisasi regional *Shanghai Cooperation Organization* (SCO) yang mewadahi kerja sama strategis antara Tiongkok dengan negara-negara Asia Tengah. Pendekatan Tiongkok di kawasan Asia Tenggara mendapatkan respon yang relatif berbeda. Sebagian besar negara di Asia Tenggara dikenal memiliki sejarah kedekatan hubungan dengan AS. Meskipun demikian, sikap politik Asia Tenggara yang direpresentasikan oleh ASEAN, memandang Tiongkok perlunya memberikan respon positif tertentu terhadap munculnya kekuatan besar baru di kawasan. Pandangan ini dibuktikan dengan keberadaan ASEAN+1, dimana Tiongkok merupakan mitra pertama ASEAN dalam kerja sama strategis ASEAN dengan aktor negara Non-Asia Tenggara. Di sisi lain, penguatan regionalisme di Asia Tenggara tampaknya juga menjadi daya tarik bagi Tiongkok untuk mengambil manfaat positif dari fenomena regional tersebut. Hingga kini respon Asia Tenggara terhadap pendekatan Tiongkok

cenderung masih hati-hati. Negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia masih bersikap selektif terhadap pendekatan yang dilakukan oleh Tiongkok. Kebijakan ini diambil didasari oleh tidak adanya informasi yang memadai mengenai sikap Tiongkok ketika negara tersebut semakin kuat hingga mungkin menjadi hegemon global. Tiongkok menyikapi hal ini dengan berusaha membangun citra bahwa munculnya Tiongkok sebagai kekuatan besar adalah kemunculan “raksasa yang bersahabat” atau “*peaceful rise*”. Selain pendekatan yang bersifat multilateral, Tiongkok banyak melakukan pendekatan yang bersifat bilateral kepada negara-negara Asia Tenggara tertentu. Meskipun sebagian besar negara di Asia Tenggara memiliki latar belakang kedekatan hubungan dengan AS, Tiongkok melihat kesempatan untuk memperluas pengaruh politiknya di beberapa negara tertentu yang dikenal kurang memiliki hubungan baik dengan AS dan negara-negara Barat seperti di Kamboja, Laos dan Myanmar.

2) Pengembangan Kekuatan Militer Tiongkok. Pengembangan kekuatan militer Tiongkok (*People's Liberation Army-PLA*) merupakan salah satu isu regional yang banyak mendapatkan perhatian beberapa waktu terakhir. Sejalan dengan kemunculan Tiongkok sebagai kekuatan besar, kekuatan PLA mengalami perkembangan yang pesat. Sebagai aktor negara yang berpotensi menjadi kekuatan global yang dominan, tampaknya Tiongkok menyadari peran penting dari militer yang kuat dan modern sebagai instrumen penjamin kepentingan nasional Tiongkok sebagai negara besar. Modernisasi merupakan fokus utama dari kebijakan peningkatan kekuatan PLA. Kenaikan anggaran Tiongkok yang mencapai dua digit setiap tahunnya menimbulkan kekhawatiran negara-negara tetangga di kawasan, khususnya terkait dengan kemungkinan perubahan perimbangan kekuatan. AS sebagai kekuatan yang sudah mapan dalam struktur regional tampak memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan kekuatan PLA ini. Keberadaan PLA yang semakin kuat dianggap ancaman terhadap superioritas militer AS dan negara-negara sekutunya di kawasan. Sejumlah negara sekutu AS di Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan telah menunjukkan kekhawatiran terhadap perkembangan PLA. Meskipun demikian, sebagai sekutu utama AS di kawasan, secara teknis kedua negara tersebut masih memiliki keunggulan teknologi militer dibandingkan dengan Tiongkok. Situasi yang berbeda

dihadapi oleh negara-negara Asia Tenggara yang rata-rata memiliki kekuatan militer yang relatif terbatas jika dihadapkan dengan isu perubahan perimbangan kekuatan. Dalam konteks Asia Tenggara, pengembangan kekuatan PLA setidaknya dua aspek utama yang layak mendapat perhatian yaitu upaya menandingi kekuatan militer AS dan pengembangan kekuatan Angkatan Laut Tiongkok (*People's Liberation Army Navy—PLAN*) sebagai instrumen proyeksi kekuatan di tingkat regional. Langkah Tiongkok antara lain:

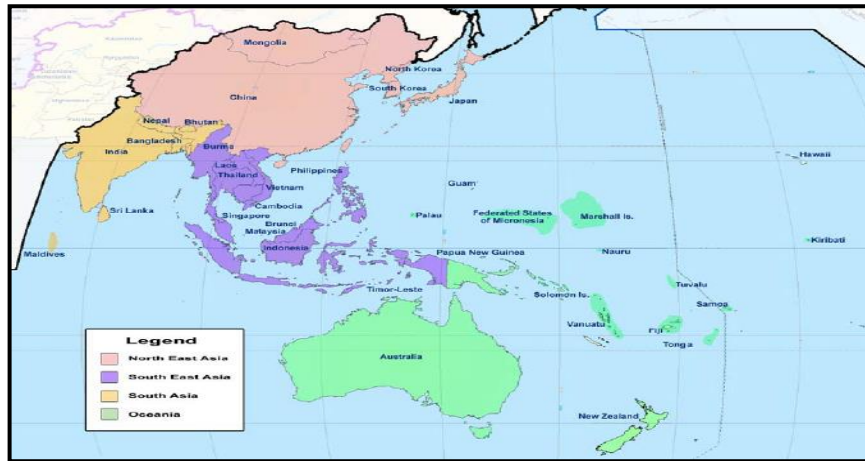
- a) Pertama: Upaya menandingi kekuatan militer AS di kawasan. Representasi nyata dari kehadiran kekuatan militer AS di Asia Pasifik tampak dari keberadaan gugus tugas kapal induk (*Carrier Battle Group—CG*) yang berada di bawah Armada Ketujuh dan Armada Kelima. Salah satu strategi Tiongkok untuk menandingi kekuatan AL AS adalah dengan konsep yang dikenal sebagai *Anti-Access Area-Denial* (A2AD). Secara garis besar konsep ini dikembangkan sebagai cara untuk membatasi ruang gerak Armada AL AS dengan menggunakan instrumen yang berbasis di daratan (*Land Based Sea Control*). Sebagai ujung tombak dari konsep ini adalah keberadaan rudal balistik permukaan ke permukaan DF-21D yang difungsikan sebagai penghancur armada kapal induk (*carrier killer*).
- b) Kedua: Pengembangan PLAN sebagai instrumen proyeksi kekuatan Tiongkok. Perubahan strategi pertahanan maritim Tiongkok merupakan bagian dari perubahan besar dalam doktrin pertahanan Tiongkok. Sejalan dengan kebijakan Reformasi Tiongkok, Tiongkok memandang perlu untuk mengubah doktrin pertahanan agar sesuai dengan kebutuhan Tiongkok sebagai kekuatan baru di masa depan. Doktrin pertahanan lama yaitu *People's War*—yang merupakan hasil pemikiran Mao Zedong⁹, dianggap tidak relevan lagi dengan kebutuhan aktual Tiongkok. Tiongkok membutuhkan doktrin pertahanan baru yang sesuai dengan konteks strategis Tiongkok sebagai kekuatan besar.

⁹ *People's War* merupakan doktrin yang menekankan pada tindakan bertempur pasif dengan membiarkan musuh masuk ke dalam wilayah Tiongkok untuk dihancurkan oleh kekuatan perlawanan PLA di daratan. Substansi dari doktrin ini menyesuaikan dengan kondisi riil PLA ketika strategi dirumuskan, dimana PLA digambarkan akan mengatasi keunggulan teknologi dari kekuatan agresor dengan menggunakan keunggulan pengetahuan dan penguasaan wilayah serta kuantitas personel.

Doktrin Pertahanan meskipun secara penamaan tidak berubah, namun mengalami redefinisi menjadi lebih bersifat *forward defense*. Perubahan doktrin ini berpengaruh besar dalam pembangunan kekuatan PLA. Dalam doktrin pertahanan ini ruang peran yang lebih besar diberikan kepada Angkatan Laut Tiongkok (*People's Liberation Army Navy-PLAN*). PLAN yang semula merupakan kekuatan *Coastal Defense* dikembangkan menjadi kekuatan angkatan laut yang akan diproyeksikan di tingkat regional dan global untuk mendukung kepentingan nasional Tiongkok.

b. Gelar Kekuatan AS di Asia-Pasifik. Kawasan Asia Pasifik merupakan kawasan yang mendapatkan perhatian khusus dari AS. Salah satu bentuk perhatian yang besar ini tampak dari besaran kekuatan militer AS yang tergabung dalam Komando Pasifik AS (*United States Pacific Command-USPACOM*).¹⁰ Komando Pasifik mempunyai wilayah kewenangan yang sangat luas mulai dari ujung timur Samudera Pasifik hingga sebagian perairan Samudera Hindia. Wilayah ini melingkupi area seluas sekitar 272 kilometer persegi dan didiami hampir 60 persen populasi dunia. Wilayah kewenangan Komando Pasifik terentang di sepanjang 36 negara di Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan dan Barat meliputi Australia, Selandia Baru, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Timor Leste, Bangladesh, Bhutan, Nepal, India, Maladewa, Sri Lanka, Korea Selatan, Korea Utara, Jepang, Tiongkok, Mongolia, Kepulauan Solomon, Tonga, Samoa, Fiji, Mikronesia, Palau, Tuvalu, Papua Nugini, Vanuatu, Kiribati, Kepulauan Marshall, dan Nauru.

¹⁰Komando Pasifik merupakan salah satu dari komando tempur terpadu (*Unified Combatant Command*) militer AS, yang diorganisasikan dengan wilayah penugasan yang mengacu pada lokasi di kawasan tertentu. Adapun militer AS mempunyai enam komando tempur terpadu meliputi, *U.S. Pacific Command* (USPACOM), *U.S. Central Command* (USCENTCOM), *U.S. Africa Command* (USAFRICOM), *U.S. European Command* (USEUCOM), *U.S. North Command* (USNORTHCOM) dan *U.S. Southern Command* (USSOUTHCOM).



Gbr. 5 Wilayah Kewenangan Komado Pasifik (Sumber: USPACOM's Official Website)

AS menggelar kekuatan militer gabungan empat matra yang sangat besar di Komando Pasifik. Jumlah total personel Komando Pasifik AS sekitar 330.000 orang, yang mencapai 20 persen dari kekuatan personel militer AS. Armada Pasifik AL AS terdiri dari 180 kapal perang termasuk lima grup tempur udara kapal induk, 2.000 pesawat udara dan 140.000 pelaut. Kekuatan Marinir AS di Komando Pasifik meliputi dua pertiga dari kekuatan keseluruhan Marinir AS, termasuk dua *Marine Expeditionary Forces* dengan jumlah kekuatan personel sekitar 85.000 orang. Kekuatan Angkatan Udara AS di Komando Pasifik terdiri dari 43.000 personel dan 435 pesawat udara. Kekuatan Angkatan darat AS di Komando Pasifik terdiri atas 60.000 personel, termasuk diantaranya lima brigade *Stryker*. Selain Komando Pasifik juga membawahi 1.200 personel Pasukan Khusus. Selain personel militer, Departemen Pertahanan AS menempatkan sekitar 38.000 personel sipil di seluruh wilayah tanggungjawab Komando Pasifik. Sebagai tambahan di wilayah Pasifik juga terdapat U.S. Coast Guard dengan kekuatan sekitar 27.000 personel.¹¹

c. Persaingan Global AS-Tiongkok di Mata Indonesia. Indonesia menempati posisi yang penting dalam konteks kehadiran AS di Asia Tenggara. Peran penting Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejumlah faktor yang melekat pada Indonesia yang menjadi nilai strategis Indonesia mulai dari wilayah yang luas, jumlah penduduk yang besar, dan kekayaan sumber daya alam. Perkembangan regional dan global juga menempatkan Indonesia dalam posisi yang semakin strategis dan berdaya tarik tinggi. Di antara sejumlah faktor yang menjadi daya tarik baru Indonesia meliputi

¹¹ Headquarter of United States Pacific Command, *USPACOM Facts*, diakses dari <http://www.pacom.mil/about-uspacom/facts.shtml>, pada 27 Desember 2017.

posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia dan masih terus bertumbuh dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Faktor-faktor yang telah disebutkan tersebut membuat Indonesia menjadi salah satu aktor paling potensial dalam menentukan dinamika dan tatanan keamanan di Asia Tenggara dalam beberapa waktu ke depan. Persaingan AS dan Tiongkok di Indonesia pada dasarnya merupakan suatu bentuk turunan dari persaingan AS dan Tiongkok di Asia Tenggara, yang juga merupakan turunan dari persaingan AS dan Tiongkok di Asia Pasifik. Berbeda dengan sejumlah negara di kawasan yang sudah mengambil sikap dan posisi terkait persaingan AS dan Tiongkok, Indonesia hingga kini masih konsisten menjalankan politik bebas aktif yang cenderung berusaha untuk tidak menempatkan diri di salah satu pihak. Di sisi lain, ketidakberpihakan Indonesia merupakan isyarat bagi keterbukaan Indonesia untuk menerima pendekatan-pendekatan dari berbagai pihak selama itu sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia. Pendekatan kepada Indonesia dapat dipandang sebagai salah satu kunci untuk memenangkan dominasi regional di Asia Tenggara.

11. Asia Tenggara sebagai Zona Penyangga.

a. **Rebalancing AS.** Upaya AS mengimplementasikan strategi *rebalance to Asia-Pacific* terhambat oleh adanya keterlibatan kekuatan-kekuatan lain seperti Tiongkok, Rusia, Iran dan India. Dengan demikian pertarungan politik tidak terhindarkan terjadi di Timur Tengah (konflik Suriah), Asia Selatan, Asia Timur dan Asia Tenggara. Kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan multidimensi global berimplikasi kepada persaingan ekonomi di seluruh dunia. Hal ini mengancam monopoli AS dan sekutunya di kawasan-kawasan tertentu seperti misalnya Asia, Afrika, Amerika Latin dan Pasifik Selatan. Saat ini, di kawasan-kawasan tersebut, hegemoni AS kian memudar akibat kuatnya persaingan pengaruh Tiongkok.

b. **Prospek Politik dan Ekonomi.** Indonesia memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi AS, tercatat setidaknya ada lebih dari 35 investor asal AS yang meliputi perusahaan-perusahaan multinasional seperti Freeport-McMoran, General Motors, Caltex, Chevron, Exxon, Schlumberger, Unocal dan Newmont. Dalam lima tahun mendatang investasi AS di Indonesia direncanakan mencapai US\$ 61 miliar,

sementara dalam sembilan tahun terakhir mencapai US\$ 65 miliar.¹² Hal ini menunjukkan upaya AS mempercepat peningkatan investasi di Indonesia. Sebagai aset yang cukup besar, tentunya investasi tersebut perlu dijamin keamanan dan keberlangsungannya melalui tangan-tangan politik dan militer. Sebagai implementasi dari kebijakan *rebalancing to Asia-Pacific* yang mendapat kritik Kongres AS karena selama ini terlalu menekankan kepada pengerahan militer dan prakarsa-prakarsa.

c. **Prospek Militer.** Di bidang militer, AS telah memiliki mitra yang kokoh di Asia Tenggara yang didukung dengan akses terhadap fasilitas-fasilitas militer yang memadai. Meskipun demikian, kehadiran personel militer dan peralatan tempurnya di Asia Tenggara tercatat masih minim antara lain di *Changi Naval Base* Singapura, AS menempatkan kapal patroli *Littoral Combat Ship* dan ratusan personel militernya, begitupun di Filipina dan Thailand. Kehadiran militer AS di seputar sub-kawasan Asia Tenggara dengan tingkat yang signifikan hanya berada di Guam dan Australia. Hal ini pun dihitung sebagai manuver yang terlambat dan dapat dianggap sebagai langkah reaktif (responsif) terkait sepak terjang militer Tiongkok di Pasifik Barat. Upaya AS mengamankan jalur logistik di Pasifik Barat hanya dihitung siap bagi kawasan Asia Timur dan tidak bagi kawasan Asia Tenggara. Hal ini merupakan konsekuensi dari deklarasi ASEAN sebagai *Zone of Peace, Freedom and Neutrality* (ZOPFAN) yang ditandatangani Menlu-menlu negara anggotanya pada tahun 1971 di Kuala Lumpur. Dengan demikian, kehadiran militer AS di Asia Tenggara akan sangat bergantung kepada konteks kerja sama pertahanan ASEAN-Plus serta aliansinya dengan Australia. Kesiapan AS dalam menghadapi situasi kontinjensi di Asia Tenggara, khususnya konflik Laut China Selatan, ditentukan oleh seberapa cepat AS menyiapkan pangkalan aju dan menempatkan armadanya di dekat wilayah-wilayah yang berpotensi konflik serta mengancam kepentingan atau keamanan nasionalnya. Penunjukan Darwin sebagai pangkalan aju militer AS merupakan langkah strategis yang memunculkan pandangan positif di sisi pihak pro-AS sekaligus pandangan negatif di sisi lain, misalnya Tiongkok dan Indonesia sebagai pihak netral. Indonesia memandang penempatan marinir AS di Darwin sebagai persiapan menghadapi kemungkinan situasi genting di Papua, dan ini berarti sebuah ancaman intervensi militer asing serta pelanggaran kedaulatan NKRI. Di saat menguatnya kontroversi penempatan marinir AS di Darwin yang dinyatakan Presiden Obama sebagai bagian dari persiapan bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, isu rencana AS

¹²U.S. Companies Plan to Speed Pace of Investing in Indonesia. The Wall Street Journal, diakses dari <http://online.wsj.com/news/articles/> tanggal 2 Oktober 2017.

menjadikan Pulau Cocos (*Australian Indian Ocean Territory*) sebagai pangkalan skuadron UAV-nya memicu reaksi keras dari Pemerintah RI, walaupun akhirnya rencana tersebut dibantah oleh pihak Australia.

12. Quo Vadis ASEAN? ASEAN telah mencanangkan tiga pilar kerja sama untuk diimplementasikan dalam suatu komunitas antarbangsa di Asia Tenggara. Namun menghadapi situasi konflik di Laut China Selatan, masih sporadisnya sengketa perbatasan yang terjadi di antara negara anggota ASEAN serta isu keamanan lintas negara yang bermuatan persoalan-persoalan domestik di masing-masing negara, cita-cita terwujudnya satu Komunitas ASEAN dalam waktu dekat ini menjadi hal yang dipandang mustahil. Permasalahan yang menyangkut sengketa wilayah lalu lintas maritim dan udara di Asia Tenggara merupakan tantangan terberat ASEAN yang tidak mungkin terselesaikan tanpa turut campurnya kekuatan non-ASEAN, khususnya negara-negara besar seperti AS dan Tiongkok. Dalam hal ini, aliansi pro-AS merupakan kekuatan yang dominan di sub-kawasan yang meliputi Filipina, Singapura, dan Thailand, di samping hubungan yang meningkat antara AS dan Vietnam, pengaruh hegemoni AS yang kuat di Brunei Darussalam, Malaysia dan Indonesia, serta posisi Asia Tenggara yang dikelilingi negara-negara sekutu AS lainnya seperti Australia, Jepang, Korsel dan Taiwan.

13. Posisi Indonesia. Politik luar negeri Indonesia yang dikenal sebagai politik bebas-aktif, serta kemudian mengembangkan konsep *dynamic equilibrium* dengan motto "*thousand friends and zero enemy*" seringkali dipahami secara keliru. Terjalannya persahabatan dengan negara lain dalam bentuk kerja sama merupakan sarana untuk mencapai tujuan menyejahterakan rakyat, menjaga kedaulatan serta mengamankan kepentingan nasional. Sedangkan tidak adanya musuh dalam hubungan internasional merupakan kondisi ideal bagi terciptanya perdamaian dunia. Hal ini merupakan cara bersikap Indonesia dalam menjalin suatu hubungan dengan negara lain. Di sisi lain, kondisi tersebut akan bergantung kepada sikap negara lain terhadap Indonesia, karena sikap permusuhan negara lain terhadap Indonesia akan menyebabkan situasi yang berlainan dengan motto yang digunakan. Lebih jauh, pengertian sikap "permusuhan" memerlukan batasan-batasan yang jelas agar pendirian politik Indonesia tetap berorientasi kepada kepentingan nasionalnya. Politik luar negeri bebas-aktif semestinya digunakan guna memenangi diplomasi internasional yang dibutuhkan bagi tercapainya tujuan-tujuan nasional. Dalam menjalin hubungan bilateral dengan negara-negara besar seperti AS dan Tiongkok, Indonesia memiliki tujuan menjaga hubungan tersebut dalam kerangka perdamaian dunia, memanfaatkan hubungan tersebut

untuk kesejahteraan rakyat, dan menggunakan hubungan tersebut untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Penggunaan hubungan bilateral dalam menjaga kedaulatan memiliki arti dan konsekuensi bahwa jalur diplomatik akan digunakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan atas wilayah sebagai entitas ekonomi, politik, dan sosial-budaya (entitas nasional). Kekeliruan dalam memahami, memandang atau menggunakan hubungan tersebut dapat membahayakan kepentingan nasional, sebagai contoh yaitu tergadainya kepentingan nasional kepada kepentingan bangsa lain. Hubungan kerja sama pertahanan Indonesia dengan negara-negara rival AS seperti Tiongkok dan Rusia tidak begitu menarik perhatian dan menjadi persoalan bagi AS. Dalam pandangan AS, Indonesia berbeda dengan Pakistan yang memanfaatkan hubungannya dengan Tiongkok sebagai *bargaining politics*. Indonesia, sebagaimana bunyi konstitusinya yang selalu dinyatakan dalam forum-forum internasional, hanya menginginkan terwujudnya perdamaian dunia, terjalinnya persahabatan antar negara serta terlaksananya kerja sama, baik melalui kerja sama regional Asia-Pasifik, forum-forum ASEAN-Plus maupun forum-forum lintas kawasan. Kehadiran AS di Asia Tenggara disikapi oleh Indonesia sebagai *counter-balance* terhadap menguatnya pengaruh Tiongkok di sub-kawasan tersebut, dan dalam pandangan Indonesia, hal ini diperlukan bagi stabilitas di Asia Tenggara. Sejauh ini, Indonesia menyambut kehadiran negara-negara besar sebagaimana yang dilakukan ASEAN melalui forum ASEAN-Plus yang melibatkan negara-negara penting di kawasan Asia-Pasifik seperti AS, Rusia, Tiongkok, Jepang, Korsel, India, Australia dan Selandia Baru. Terungkapnya praktik penyadapan oleh AS, Australia, Korsel dan Singapura terhadap sejumlah pejabat penting Indonesia atas pengakuan seorang mantan kontraktor *National Security Agency* (NSA), Edward Joseph Snowden yang membelot, memicu Pemerintah RI untuk mengirim nota protes dan permintaan klarifikasi kepada AS dan Australia. Protes Pemerintah RI ke AS melalui Kedubesnya di Jakarta sepertinya tenggelam begitu saja sebagai formalitas komunikasi kedua negara atas kasus yang tidak terlalu penting. Hal tersebut sangat kontras perbedaannya dengan protes RI kepada Australia yang terus di-*blow-up* media masa di kedua negara sedemikian rupa sehingga terkesan begitu berlebihannya sikap Pemerintah RI terhadap kasus penyadapan itu. Dengan demikian, sudah dipastikan bahwa sikap politik Indonesia terhadap AS lebih dari sekadar hubungan persahabatan dua negara. Meruntut kepada sejarah berakhirnya pemerintahan Soekarno dan dimulainya masa pemerintahan Soeharto, *aligning* Indonesia kepada Blok Barat pimpinan AS sudah cukup jelas. Selama pemerintahan Soeharto, Indonesia yang menerapkan kebijakan anti-komunis (sesuai Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966) dipandang

sebagai sahabat AS di Asia Tenggara, ditandai dengan mengalirnya pasokan persenjataan dan dukungan bagi integrasi Timor Timur (Timtim) tahun 1975.

Penutup

14. Kesimpulan. Dari pembahasan naskah kajian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Indonesia menjadi wilayah penting bagi AS karena disamping banyak choke point juga merupakan jalur komunikasi laut dan perdagangan internasional. Di samping itu, terdapat lebih dari 35 investor asal AS berkepentingan terhadap jaminan keamanan akses-akses di sub-kawasan Asia Tenggara.
- b. Krisis ekonomi yang melanda AS berkonsekuensi kepada pemotongan anggaran pertahanan sehingga mendorong AS untuk berkonsentrasi di Asia-Pasifik agar tetap menjadi hegemon di kawasan yang sangat penting bagi perekonomian AS yang pada gilirannya semakin mengarah kepada upaya membendung kekuatan Tiongkok di kawasan.
- c. Seiring berkembangnya semangat regionalisme di kawasan Asia-Pasifik, khususnya di Asia Tenggara, serta tumbuhnya potensi ekonomi dalam kerangka pasar bebas, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN mencanangkan sebuah Komunitas ASEAN yang berdasarkan tiga pilar, yaitu keamanan politik (APSC), ekonomi (AEC) dan sosial-budaya (ASCC). Menghangatnya konflik Laut China Selatan diperkirakan akan menjadi tantangan terbesar terbentuknya Komunitas ASEAN, dimana pengaruh AS dan Tiongkok akan menjadikan wilayah komunitas tersebut sebagai kancah persaingan dan zona penyangga.
- d. Upaya AS dalam memperkuat kehadirannya di Asia Tenggara membawa implikasi yang sangat kompleks bagi keamanan nasional Indonesia. Kehadiran tersebut semakin menambah “tekanan” AS terhadap kepentingan-kepentingan yang berseberangan.

e. Lemahnya ASEAN dalam menentukan sikap terhadap konflik dan kontinjensi di wilayahnya akan membawanya kepada ketergantungan total terhadap kekuatan negara-negara besar seperti AS dan Tiongkok. Resiko ini merupakan konsekuensi logis dari sepak terjang ASEAN yang telah mengundang keikutsertaan negara-negara plus dalam menentukan nasib masa depan keamanan di kawasan.

15. Saran. Dalam rangka memperbaiki posisi tawar Indonesia, Pemerintah sebagai agen perubahan, penyelamat, pemersatu dan penggerak kemajuan bangsa seyogianya melakukan langkah-langkah berikut:

a. Dalam Negeri.

- 1) Meningkatkan potensi *bargain power* Indonesia kekuatan dengan meningkatkan kekuatan dan mengeliminir kelemahan akan setiap tantangan serta ancaman keamanan nasional saat ini dan saat mendatang dengan tetap menjaga keutuhan NKRI.
- 2) Kondisi saat ini tidak memungkinkan bagi RI untuk berjuang secara mandiri mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi, sehingga diperlukan sikap yang jelas dalam menentukan negara mitra atau bahkan beraliansi untuk mengatrol pencapaian kemajuan.
- 3) Menjadikan kepentingan dan keamanan nasional sebagai panglima pembangunan nasional (khususnya pertahanan) yang didukung oleh politik luar negeridengan mengantisipasi terjadinya konflik di Laut China Selatan dan meningkatkan kemampuan blokade laut serta blokade udara dengan menggunakan *Anti Aircraft Artillery* dan pesawat *interceptor* sekelas Su-27/30/35 atau F-16 Viper.
- 4) Segenap jajaran Pemerintah RI harus menentukan skala prioritas pembangunan, meningkatkan efisiensi, dan mendorong terciptanya kinerja yang patriotik serta berorientasi kepada keselamatan dan kesejahteraan bangsa.

b. Luar Negeri.

- 1) Mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dalam mendekati AS (*aligning to US*) yang memiliki *bargain power* lebih besar dengan tetap bersikap jelas dan menerapkan standar ganda.
- 2) Indonesia harus menjalin dan memperkuat komunikasi bilateral dengan negara-negara sahabat yang berpotensi menjadi sekutu yang menguntungkan dengan memelihara dialog pada komunitas negara sekutu AS atau Rusia beserta sekutunya agar dapat memposisikan diri dan mempunyai nilai tawar yang lebih baik.

16. Wusana Kata. Demikian penulisan naskah tentang Kajian Kehadiran Amerika Serikat di Kawasan Asia Tenggara dan Implikasinya Bagi Pertahanan Negara Indonesia semoga naskah ini dapat memberikan masukan kepada pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Jakarta, Maret 2018

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Bert, Wayne. (2003). *The United States, Tiongkok and Southeast Asian Security: A Changing of The Guard?*, Palgrave MacMillan, New York.
2. Lum, Thomas. (2008). *Comparing Global Influence: Tiongkok's and U.S. Diplomacy, Foreign Aid, Trade, and Investment in the Developing World*, Congressional Research Service, Washington DC.
3. Medeiros, Evan. S. (2009). *Tiongkok's International Behavior: Activism, Opportunism, and Diversification*, RAND Corporation, Santa Monica.
4. O'Rourke, Ronald. (2013). *Tiongkok Naval Modernization: Implications for U.S. Navy Capabilities – Background and Issue for Congress*, Congressional Research Service, Washington DC.
5. Shambaugh, David. (2004). *Modernizing Tiongkok's Military*, University of California Press, Los Angeles.
6. Shuaihua, Cheng. (2012). *Tiongkok's International Aid Policy and Its Implications for Global Governance*, Research Center for Chinese Politics & Business Indiana University.
7. --, --. (2013). *IISS Military Balance 2013*, International Institute for Strategic Studies, London.
8. --, --. (2013). *Military and Security Developments Involving the People's Republic of Tiongkok 2013*, Office of the Secretary of Defense, Washington DC.
9. --, --. (November 2013). *U.S. – Tiongkok Economic and Security Review Commission, 2013 Report to Congress*.
10. --, --. (2010). *National Security Strategy 2010*. Office of the President of United States of America, Washington DC.

11. --, --. (2013). State, Foreign Operations, and Related Programs: FY2014 Budget and Appropriations. Congressional Research Service, USA.

Internet

1. Gooch, Liz. Asia Free-Trade Zone Raises Hopes, and Some Fears About Tiongkok, diakses http://www.nytimes.com/2010/01/01/business/global/01trade.html?_r=0>, pada 30 Desember 2017.
2. Headquarter of United States Pacific Command, USPACOM Facts, diakses <http://www.pacom.mil/about-uspacom/facts.shtml>>, pada 27 Desember 2017.
3. Indian-Vietnam Naval Exercise Launched in South Tiongkok Sea, diakses <http://www.wantiongkoktimes.com/news-subclass-cnt.aspx?id=20130610000067&cid=1101>>, 10 Juni 2013, pada 23 Desember 2017.
4. Masako, Ishii. (24 Maret 2013). The Southern Philippines: Exit from 40 Years of Armed Conflict, diakses <http://peacebuilding.asia/the-southern-philippines-exit-from-40-years-of-armed-conflict/>>, pada 24 Desember 2017.
5. Song, Sophie. (29 Oktober 2013). Myanmar FDI: Tiongkok Accounts For One Third of Foreign Investment In Myanmar With 14 Billion USD, International Bussines Times, diakses <http://www.ibtimes.com/myanmar-fdi-tiongkok-accounts-one-third-foreign-investment-myanmar-14-billion-1446282>>, pada 24 Desember 2017.
6. Thailand: Beheadings, Burnings in Renewed Terror Campaign: Insurgents Must Cease Targeting Civilians in the South, Human Rights Watch, diakses <http://www.hrw.org/en/news/2008/07/06/thailand-beheadings-burnings-renewed-terror-campaign>>, 8 Juli 2008, pada 23 Desember 2017.
7. U.S. Energy Information Administration, Country Data: Japan dalam diakses <http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=JA>>, data per-tanggal 29 Oktober 2013, pada 16 Desember 2017.

8. U.S. Energy Information Administration, Country Data: South Korea dalam diakses <http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=KS>>, data per-tanggal 17 Januari 2013, pada 16 Desember 2017.
9. U.S. Companies Plan to Speed Pace of Investing in Indonesia. The Wall Street Journal, diakses <http://online.wsj.com/news/articles/>> tanggal 2 Oktober 2017.
10. Obama will pledge to increase America's military presence in the Asia-Pacific region when he begins Australia tour. Martime Security, diakses <http://maritimesecurity.asia/free-2/maritime-security-asia/obama-will-pledge-to-increase-americas-military-presence-in-the-asia-pacific-region-when-he-begins-australia-tour/>> 16 November 2017.
11. <www.washingtonpost.com>